

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI HAK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk
mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH****SYAHDATUL LATIF****NIM: 11527104153****PROGRAM S1****JURUSAN ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****2019**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI HAK MEMILIH DALAM PEMLIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN)"**, yang ditulis oleh:

Nama : SYAHDATUL LATIF

NIM : 11527104153

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Agustus 2019

Pembimbing Skripsi

MUSRIFAH, SH., MH
NIP. 130 217 039

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, *IMPLEMENTASI HAK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan)*, yang ditulis oleh :

Nama : Syahdatul Latif
NIM : 11527104153
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 12 September 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Oktober 2019

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I
Lovelly Dwina Dahan., SH., MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 1986031 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SYAHDATUL LATIF
 NIM : 11527104153
 Tempat / Tanggal Lahir : Pelantai, 28 Desember 1996
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **"Implementasi Hak Memilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan)"**, adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



SYAHDATUL LATIF
 NIM: 11527104153

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Syahdatul Latif (2019) : Implementasi Hak Memilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan)

Pemilihan Umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih pemimpin seperti Presiden dan wakil-wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota DPD, DPR dan DPRD. Pemilihan umum juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan dalam pemilu khususnya di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang diselenggarakan oleh KPU belum dilaksanakan dengan baik, dimana masih ada dalam pemilihan umum masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis.

Dilihat dari latarbelakang di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi kasus di TPS 22 dan 23 kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan), serta apa faktor penghambat terhadap implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi kasus di TPS 22 dan 23 kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada cara penyelesaian masalah.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap hak memilih dalam pemilihan umum di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Pemilu belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, belum sesuai dengan pasal 202- 209, 210, 344, 348. Banyak kendala-kendala yang di hadapi oleh penyelenggara pemilihan umum. Adapun faktor penghambat terhadap implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang no. 7 tahun 2017 di kelurahan Sidomulyo barat kec. Tampan adalah *Pertama*, Adanya penambahan waktu terhadap pendaftaran DPTb dan Suket bisa digunakan untuk mencoblos berdasarkan putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 sehingga KPU tidak sanggup untuk mencetak surat suara pada 7 hari sebelum pencoblosan dan tidak bisa memastikan jumlah warga yang menggunakan suket. *Kedua* Kurangnya surat Suara. *Ketiga*, Tidak transparannya KPU dalam Memasukkan surat Suara ke kotak Suara. *Keempat*, Kurangnya koordinasi antar petugas TPS. *Kelima* Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran hak pilihnya dan penetapan dan perbaikan sistem DPT yang belum baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanallahu Wata'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program Strata Satu fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul skripsi yang penulis teliti adalah **"Implementasi Hak Memilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan)."**

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Tidak terlepas dari kekurangan baik dari aspek kualitas maupun dari aspek kuantitas dari materi peneliti yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan, saran dan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada :

Terkhusus untuk Ayahanda Syarifudin dan Ibunda Farida Hanim, yang telah memberikan dukungan, baik materil dan non materil, segala doa, nasehat dan semangat tiada henti penulis dapatkan selama proses perkuliahan penyusunan skripsi ini hingga selesai. Tidak ada balasan yang sempurna kecuali menghadapkan limpahan rahmat pahala dan keberkahan dari Allah swt.

Kepada Atah Ali Amran, Encu Padhil, Abang Muhammad Hanif dan Adik Nurhasanah serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik materi maupun non materi selama proses perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin S.Ag. M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan pendidikan di Universitas ini.

4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag Selaku Dekan, Dr. Drs. H. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Wakil dekan II dan Bapak Dr. Maghfirah MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan pendidikan di Fakultas ini.

Bapak Firdaus, SH., MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim, S.Ag, M.Hum selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Musrifah SH., MH. Selaku Pembimbing Skripsi yang memberikan kemudahan dan arahan dalam masa proses pembuatan skripsi ini,

Bapak Asril SH., MH. Selaku Penasehat Akademis yang memberikan dorongan dan motivasi selama masa Perkuliahan,

Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam administrasi,

10. Dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum tahun ajaran 2015 dan teman-teman, serta teman-teman kosan yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan informasi bagi seluruh kalangan, baik masyarakat dan lembaga terkait serta khususnya Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan Sarjana Hukum semoga bermanfaat untuk membangun wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 23 Agustus 2019

Syahdatul Latif
11527104153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI	
A. Sejarah Singkat Kelurahan Sidomulyo Barat	15
B. Lokasi Kantor dan Kondisi Geografis Kelurahan Sidomulyo Barat	15
C. Daftar Urutan Pangkat ASN Kelurahan Sidomulyo Barat ...	17
D. Demografi Kelurahan Sidomulyo Barat	18
E. Struktur Organisasi Kelurahan Sidomulyo Barat	21
F. Perangkat Anggota Panitia Pemugutan Suara (PPS) Kelurahan Sidomulyo Barat	22
G. Daftar pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Sidomulyo Barat	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemilihan Umum.....	25
1. Konsep Dasar Pemilihan Umum	25
2. Tujuan Pemilihan Umum.....	28
3. Ciri Pemilihan Umum.....	32
4. Sistem Pemilihan Umum	34
5. Sejarah Pemilihan Umum Indonesia	41

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

B. Lembaga Pemilihan Umum	46
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU).	46
2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	50
3. Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP)	54
C. Hak Memilih dan PendaftaranPemilih	56
1. Hak Memilih dalam Pemilu	56
2. Pendaftaran Pemilih	58

A. Implementasi Hak Memilih dalam Pemilih Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan ...	58
B. Faktor Penghambat terhadap Implementasi Hak Memilih dalam Pemilih Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	12
Tabel II.1	Kependudukan	15
Tabel II.2	ASN dan THL di Kelurahan Sidomulyo Barat.....	17
Tabel II.3	Status ASN.....	18
Tabel II.4	Letak Geografis.....	18
Tabel II.5	Iklim.....	19
Tabel II.6	Kesuburan Tanah	19
Tabel II.7	Orbirasi	20
Tabel II.8	Fasilitas Umum	20
Tabel II.9	keanggotaan PPS.....	22
Tabel II.10	Pemetaan TPS.....	22
Tabel IV.1	Ketersediaan Surat suara.....	70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah suatu sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota legislatif di MPR, DPR, DPD dan DPRD. Wakil rakyat tersebutlah yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya. Untuk pertama kali pada tahun 2019 pemilihan Presiden di adakan serentak dengan pemilihan anggota legislatif.

Pemilihan Umum (PEMILU) juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.¹ Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah lembaga perwalikan rakyat yang disebut parlemen²

Partai Politik merupakan instrument yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi dinegara manapun didunia.³ Yang merupakan saluran untuk

¹Undang- undang Dasar 1945

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 414.

³ Muhadam Labolo. Teguh Ilham, *Partai politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta; PT. Raja Grapindo Persada, 2015), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin, baik untuk tingkat nasional maupun daerah dan rekrutmen pimpinan berbagai komponen penyelenggara negara, oleh karena itu peserta Pemilu untuk memilih calon Presiden harus melalui Partai politik atau gabungan partai politik dan anggota DPR dan DPRD melalui Partai Politik, dan selain itu untuk mengakomodasi aspirasi ke-anekaragaman daerah maka dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota-anggotanya dipilih dari perseorangan bersamaan dengan Pemilu untuk memilih Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR dan DPRD.

Didalam perkembangannya bisa dikatakan perpolitik dan pelaksanaan pemilu di Indonesia sejauh ini dibagi menjadi tiga, yaitu pemilu yang dilaksanakan pada masa orde lama, pemilu yang dilaksanakan pada masa orde baru dan pemilu yang dilaksanakan pada masa setelah reformasi pada yang di tandai turunnya rezim Soeharto pada tahun 1998.

Pelaksanaan pemilu pada masa orde lama dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955 yang berhasil dilaksanakan setelah mengalami berbagai macam kendala. Yang mana pemilu terselenggara secara lancar, aman, jujur serta sangat demokratis. Dan pemilu pada tahun 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik serta lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.⁴ Penyelenggaraan Pemilu 1955, dinilai dunia dan banyak ilmuwan politik sebagai episode proses demokrasi pertama terbaik di Indonesia meski kemudian produk pemilunya selama empat tahun kemudian tidak menghasilkan kesepakatan terbaik dalam menghasilkan Pemilu⁵

⁴*Ibid.*, h. 177.

⁵Ubedilah Badrun, *Sistem Politik Indonesia Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif*, Jakarta; Bumi Aksara, 2016), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pelaksanaan pemilu yang dilakukan pada masa orde baru yang dilaksanakan sebanyak enam kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dasar dilaksanakan pemilihan umum karena dikeluarkannya TAP MPRS XI/MPRS/1966.

Pemilu tahun 1971 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR. Peserta pemilu pada tahun 1971 ini diikuti oleh 10 partai politik. Setelah 1971, pemilu pemilu yang teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan enam tahun lebih setelah pemilu 1971, yaitu pada tahun 1977. Setelah itu mulai terjadwal pemilu dilaksanakan pada setiap lima tahun sekali. Namun, sejak pemilu 1977 jumlah partai kembali direduksi sehingga tersisa tiga partai saja yaitu partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan, yang mana sebelumnya pemilu menggunakan sistem multi partai. Adapun dasar hukum dari penyelenggaraan pemilu pada tahun 1977 adalah TAP MPR/ Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya pada pemilu tahun 1982, 1987 dan 1992 tidak mengalami perubahan hanya pada dasar hukum nya yang berubah yaitu menjadi undang-undang no. 2 tahun 1980. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 1997 yang mengalami perubahan hanyalah dasar hukum yaitu menjadi Undang-undang no. 5 tahun 1996 tentang Pemilihan Umum.⁶

Pada fase selanjutnya adalah pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan pada masa setelah reformasi. Pemilihan umum pertama kali

⁶*Ibid.*, h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah reformasi dilaksanakan pada tahun 1999 setelah rezim Soeharto mengundurkan diri. Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni pada 7 Juni tahun 1999.⁷ Dasar hukum penyelenggaraan pemilu ini adalah Undang-undang no. 3 tahun 1999. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun dasar hukum pertama kali pembentukan KPU adalah Ketetapan MPR RO NO.XIV/MPR/1998 tentang perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR RI No.III/MPR/1988 tentang pemilihan umum. Pada pasal 1 poin 5 Tap MPR RI No. XIV/MPR 1998 disebutkan bahwa:

Pemilihan umum diselenggarakan oleh badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur-unsur partai-partai politik peserta pemilu dan pemerintah, yang bertanggungjawab kepada Presiden.⁸ Pemilu pada masa orde baru dilaksanakan melalui sebuah proses tersentralisasi oleh tangan-tangan birokrasi yang juga berkepentingan merekrut kemenangan bagi “Partai Milik Pemerintah”.⁹

Setelah reformasi pada tahun 1998 keberadaan lembaga penyelenggara pemilihan umum disebut tegas dalam pasal 22E UUD 1945, kedudukannya sebagai penyelenggara pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri dan keberadaannya dijamin dan dilindungi secara konstitusional

⁷Miftah Thoha, *Birokrasi Politik & pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta; PT. Fajar Interpratama mandiri, 2014), h. 129.

⁸ Lihat MPR RI, Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR tahun 1990 s/d 1998 (Jakarta ; Sekretariat Jendral MPR RI, 1999.

⁹*Ibid.*, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam UUD 1945.¹⁰ KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat bebas dan mandiri, yang pembentukannya diresmikan dengan keputusan Presiden No. 17 tahun 1999. Dalam Pelaksanaan pemilu, KPU hanya bertindak sebagai penyelenggara, sedangkan yang menjadi penanggungjawab adalah Presiden.¹¹

Pada pemilihan umum selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2004. Pada tahun ini pertama kali dilaksanakan Pemilu setelah di amandemennya UUD 1945 yang mana didalam nya sudah terdapat beberapa hal seperti adanya pasal pasal tentang Hak Asasi Manusia dan sistem politik Indonesia yang harus dijamin sesuai UUD 1945 adalah sistem politik demokrasi berdasarkan hukum.¹² Pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan selanjutnya dilakukan pemilihan Presiden pertama kali yang dilakukan oleh rakyat yang diikuti oleh lima pasang calon Presiden dan calon wakil Presiden. Adapun landasan hukum dari pelaksanaan pemilu tahun 2004 adalah Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Serta Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden.¹³

Pemilu selanjutnya pada tahun 2009 yang berlandaskan pada Undang-undang no. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang mana pemilu 2009 diikuti oleh 44 partai yang mana terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta; Sinar graфика, 2012) h. 201.

¹¹ *Loc. Cit.*, 140.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta; Sinar graфика, 2012), h. 268.

¹³ *Ibid*, h. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pada tahun 2014 dilaksanakannya Pemilu yang ke 3 setelah reformasi. Yang diikuti oleh 15 partai politik yang mana terdiri dari 12 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh. Dan kemudian diikuti dengan pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang diikuti oleh 2 pasang calon.

Selanjutnya pada pemilu berikutnya dilaksanakan pada tahun 2019 yakni tepat nya pada tanggal 17 April 2019. Untuk pertama kalinya pemilu dilaksanakan secara serentak yang mana menggabungkan antara pemilihan legislatif dengan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Pemilu diikuti oleh 20 partai politik yang terdiri dari 16 Partai nasional dan 4 partai lokal Aceh. Adapun dasar hukum dilaksanakan pemilu dan dilaksanakan secara serentak adalah sesuai dengan undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Setelah dilaksanakan nya pemilihan Umum dikutip dari media *daringtribunnews.com* angka partisipasi masyarakat dalam pemilu mencapai 80,90 % yang mana jauh melampaui dari target KPU yaitu 77,5 %.¹⁴

Meskipun tingkat partisipasi pemilih tergolong tinggi, namun dalam proses pemilihan dan pasca pemilihan banyak sekali terjadi kesalahan sehingga banyak permasalahan yang muncul di masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di TPS 22 dan 23 kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Banyak dari calon pemilih yang sudah mendapatkan undangan untuk memilih serta terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun tidak dapat menggunakan hak pilih mereka. Calon pemilih tidak bisa

¹⁴ <http://www.google.com/amp/wartakota.tribunnews.com/2019/04/18/partisipasi-pemilih-pemilu-2019-tembus-8090-persen-jauh-lampaui-target-kpu-775-persen>. Diakses pada 22 Mei 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan hak pilih mereka dikarenakan surat suara sudah habis (sudah tidak tersedia). Padahal waktu baru menunjukkan pukul 10.00 wib.¹⁵

Permasalahan yang terjadi di TPS 22 dan 23 Perumahan Damai Langgeng kel. Sidomulyo Barat ini tentu bertentangan dengan pasal 344 ayat 2 undang-undang no. 7 tahun 2017 yang mengatakan bahwa jumlah surat suara yang di cetak sama dengan jumlah pemilih dalam DPT, ditambah dengan 2 persen dari DPT per TPS,¹⁶ dan juga pasal 198 undang-undang N0 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa syarat seseorang yang memiliki hak memilih terdapat pada pasal 1 dan 2 yaitu;

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin memiliki hak memilih,
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.¹⁷

Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan Prinsip demokrasi Itu sendiri yang mana bahwa tiap-tiap keputusan selalu berdasarkan atas dasar kelebihan suara,¹⁸ serta telah melanggar hak konstitusional warga Negara dalam menyampaikan aspirasinya dalam memilih pemimpin. Karena hak-hak

¹⁵ Adelia, warga yang tidak dapat memilih, wawancara pada 22 Mei 2019.

¹⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/25/18185981/kpu-didorong-ajukan-uji-materi-aturan-percetakan-surat-suara>. diakses pada 23 Mei 2019.

¹⁷ Undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁸ C.S.T. Kansil, Christine S.T kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008) h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga Negara adalah hak-hak yang dimiliki warga suatu Negara dimana status warga Negara ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Berangkat dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Implementasi Hak Memilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk membahas permasalahan ini dengan judul penelitian “IMPLEMENTASI HAK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS DI TPS 22 DAN 23 KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KEC. TAMPAN)”

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis telah mengambil batasan yang diteliti. Penelitian ini di fokuskan pada Implementasi hak memilih masyarakat dalam pemilihan umum pada tahun 2019 yang masyarakatnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 22 dan 23 kelurahan Sidomulyo Barat kec. Tampan kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang no. 7 tahun 2017 di TPS 22 dan 23 kelurahan Sidomulyo barat kec. Tampan ?

¹⁹ Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; Langga, 2016), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor penghambat terhadap Implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang no. 7 tahun 2017 di TPS 22 dan 23 kelurahan Sidomulyo barat kec. Tampan ?

D Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang no. 7 tahun 2017 di TPS 22 dan 23 kelurahan Sidomulyo barat kec. Tampan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap Implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang no. 7 tahun 2017 di TPS 22 dan 23 kelurahan Sidomulyo barat kec. Tampan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya bagi penyelenggara pemilu
- 2) Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana
- 3) Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.²¹

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang nyata pada para calon pemilih di pemilu 2019 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dan mengambil data dari penyelenggara Pemilu di kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.²² Dimana populasi dari penelitian ini adalah 1 orang kasubag Program dan data PKU kota pekanbaru, 1 orang

²⁰ HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (UN Press Surakarta 1999), h. 89.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika,2011), h. 24.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasubag keuangan, umum dan logistik, 1 orang PPS kel. Sidomulyo Barat, 2 orang Ketua KPPS kelurahan Sidomulyo Barat yaitu Ketua KPPS TPS 22 dan 23. Dan 55 orang masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 22 dan 23 kelurahan Sidomulyo Barat.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.²³ Adapun untuk penentuan responden dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *Random Sampling*. *Random Sampling* adalah dimana pemilihan elemen populasi dilakukan secara acak.²⁴

Persentase Populasi dan Sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel I.1
Tabel Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	KASUBAG Program dan Data	1 orang	1 orang	100%
2	KASUBAG Keuangan, Umum dan Logistik	1 orang	1 orang	100%
3	Ketua PPS	1 orang	1 orang	100%
4	Ketua KPPS	2 orang	2 orang	100 %
5	Masyarakat yang tidak mendapat menggunakan hak pilihnya	55	11 orang	20 %
Jumlah		60 orang	16 orang	26%

²³ *Ibid.*, h. 124.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Alfabeta, 2009) h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan skunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskritifkan secara menyeluruh, kemudian sumber data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang

konsep umum pemilu, lembaga penyelenggara pemilu dan konsep hak memilih.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan undang-undang no. 7 tahun 2017 serta faktor penghambat terhadap implementasi hak memilih masyarakat dalam pemilihan umum.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Singkat Kelurahan Sidomulyo Barat

Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dibentuk berdasarkan surat keputusan walikota Pekanbaru sesuai Peraturan Daerah (Perda). Kelurahan Sidomulyo Barat ini merupakan pemekaran dari kelurahan Sialang Munggu.

Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari 26 Rukun Warga (RW) dan 115 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan kelurahan yang memiliki jumlah Penduduk pada tahun 2016 sebanyak 41.033 jiwa dan pada tahun 2017 penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat mengalami penurunan hampir setengah dari tahun 2016 yaitu 29.448 jiwa. Namun, pada tahun 2018 mengalami perubahan dapat dilihat dari tabel berikut:²⁵

Tabel II.1
Tabel Kependudukan

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2016	20.791	20.212	41.003
2	2017	15.115	14.333	29.448
3	2018	16.336	15.963	32.226

B Lokasi Kantor dan Kondisi Geografis Kelurahan Sidomulyo Barat

Secara Geografis, lokasi penelitian berada di koordinat 101 derajat 22BT- 101 derajat 23 09 BT dan 0 derajat 28 41 LU-0 29 09 LU memiliki

²⁵ Data kelurahan Sidomulyo Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luasa wilayah 13,69 km²/22,87 % dari luas Kecamatan Tampan. Sebagian besar wilayah digunakan untuk perumahan dan sekolah.

Kondisi iklim dan cuaca di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan mengikuti iklim Kota Pekanbaru pada umumnya yang beriklim sangat basah, tipe A klasifikasi Schmidt dan Ferguson. Suhu sekitar antara 21,6⁰ -35⁰ C dengan rata-rata 28⁰ C sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9%-93,2% dengan rata-rata 74,6% dan tekanan udara 1.007.2 Mb-1.013.0 Mb dengan rata-rata 1.010.1 Mb serta memiliki kecepatan angin 7-8 knot/jam. Curah hujan antara 1.408 mm/th-4.344 mm/th, dengan rata-rata curah hujan mencapai 2.938 mm/th dari hujan selama 198 hari.

Musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai April dan September sampai Desember, dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Agustus. Keadaan topografi Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan yaitu Datar dengan Kelerengan antar 0-8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 30 m dpl. Jenis tanahnya adalah brown forest soil. Kondidi tekstut tanahnya berupa lempung dan tingkat kesuburan sedang.

Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mempunyai bermacam suku dan budaya, hudup rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan dan bahkan agama tidak menjadi mereka sulit untuk bergaul dengan sesama. Sementara budaya-budaya setiap daerah setipa suku terbina melalui kesenian tradisional, seperti tayuban, pencak silat dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga tersedia sarana dan prasarana sosial sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan masyarakat, diantaranya adalah sarana olahraga, sarana kesenian dan sarana sosial lainnya. Sarana olahraga yang tersedia antara lain lapangan sepakbola, badminton, voly dan lain-lain. Untuk sarana kesenian terdiri dari bermacam-macam kesenian diantaranya; sanggar tari, pencak silat dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sarana sosial diantaranya posyandu, pos kamling dan lain-lain.²⁶

Batas wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Yaitu ;

1. Sebelah timur berbatasan dengan Kel. Maharatu/ Kel. Sidomulyo timur
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Sialang Munggu
3. Sebelah Utara berbatas dengan Kel. Tobek Godang
4. Sebelah Selatan berbatas dengan Siak Hulu Kampar

Daftar Urutan Kepangkatan ASN Kelurahan Sidomulyo Barat

Jumlah pegawai Kelurahan Sidomulyo Barat terdiri dari Aparatu Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) kelurahan, berjumlah 10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.2
Tabel Urutan Kepangkatan ASN

No	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JULAH
1	PNS/ASN	1	7	8
2	THL	1	1	-
	JUMLAH	2	8	10

²⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Tabel Berdasarkan Status ASN

No	URAIAN	JABATAN	JUMLAH
1	ASN	LURAH	1
2	ASN	SEKLUR	1
3	ASN	KASI	3
4	ASN	STAF	3
5	THL	STAF	2

D. Demografi Kelurahan Sidomulyo Barat

1. Data Umum²⁷

- a. Luas Wilayah : 13.69 km²
- b. Batas Wilayah :
 - 1) Sebelah Utara : Kel. Tobeh Gadang
 - 2) Sebelah Selatan : Siak Hulu Kampar
 - 3) Sebelah Barat : Kel. Sialang Munggu
 - 4) Sebelah Timur : Kel. Maharatu dan Kel. Sodomulyo Timur
- c. Letak Geografis

Tabel II.4
Tabel Letak Geografis

BENTANG WILAYAH		
1	Kawasan Hutan	Tidak ada
2	Kawasan Tambang	Tidak ada
3	Kawasan Pantai	Tidak ada
4	Kawasan Perbukitan/pegunungan	Tidak ada
5	Kawasan Persawahan	Tidak ada
6	Kawasan Perkebunan	Tidak ada
7	Kawasan Peternakan	Tidak ada
8	Kawasan Industry Kecil Rumah Tangga	Ada
9	Kawasan Saluran listrik tenaga tinggi	Tidak ada
10	Kawasan Rawan banjir	Tidak ada
11	Kawasan Industry pabrik	Tidak ada

²⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BENTANG WILAYAH		
12	Kawasan Perkantoran	Tidak ada
13	Kawasan Rawa	Tidak ada
14	Kawasan Perdagangan	Tidak ada
15	Kawasan Kumuh	Tidak ada
16	Kawasan Jasa hiburan	Tidak ada
17	Kawasan Wisata	Tidak ada
18	Kawasan Bantaran sungai	Tidak ada
19	Kelurahan Perbatasan dengan Negara lain	Tidak ada
20	Kelurahan Perbatasan dengan provinsi lain	Tidak ada
21	Kelurahan Perbatasan Kelurahan dengan kab/Kota lain	Tidak ada
22	Perbatasan dengan kec.lain	Ada
23	Kelurahan kawasan Tsunami	Tidak ada

d. Iklim

Tabel II.5
Tabel Iklim

1	Curah hujan	38,6-435,0 mm/tahun
2	Jumlah bulan hujan	+ 8 bulan
3	Kelembaban Udara	46-100 %
4	Suhu rata-rata harian	23,0 – 35,6 ⁰ C
5	Tinggi tempat dari permukaan laut	5 – 10 m

e. Jenis Kesuburan Tanah

Tabel II.6
Tabel Kesuburan Tanah

1	Warna tanah (sebagian Besar)	Abu-abu
2	Tesktur Tanah	Lampungan
3	Tingkat kemiringan Tanah	0-5 ⁰
4	Lahan krisis	Tidak ada
5	Lahan terlantar	Tidak ada
6	Erosi tanah	Tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Orbirasi

Tabel II.7
Tabel Orbinasi

1	Jarak ke ibukota kecamatan	2 KM
	a. Lama jarak ke Ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor	15 menit
	b. Kendaraan umum ke ibukota kecamatan	Ada banyak
2	Jarak ke ibukota kab/kota	7 KM
	a. Lama jarak ke Ibukota kab/kota dengan kendaraan bermotor	30 menit
	b. Kendaraan umum ke ibukota kab/kota	Ada banyak
3	Jarak ke ibu kota Provinsi	7 KM
	a. Lama jarak ke Ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor	30 menit
	b. Kendaraan umum ke ibukota provinsi	Ada banyak

2. Data fasilitas umum, pendidikan, tempat tempat ibadah dan lainnya di Kel. Sidomulyo Barat²⁸

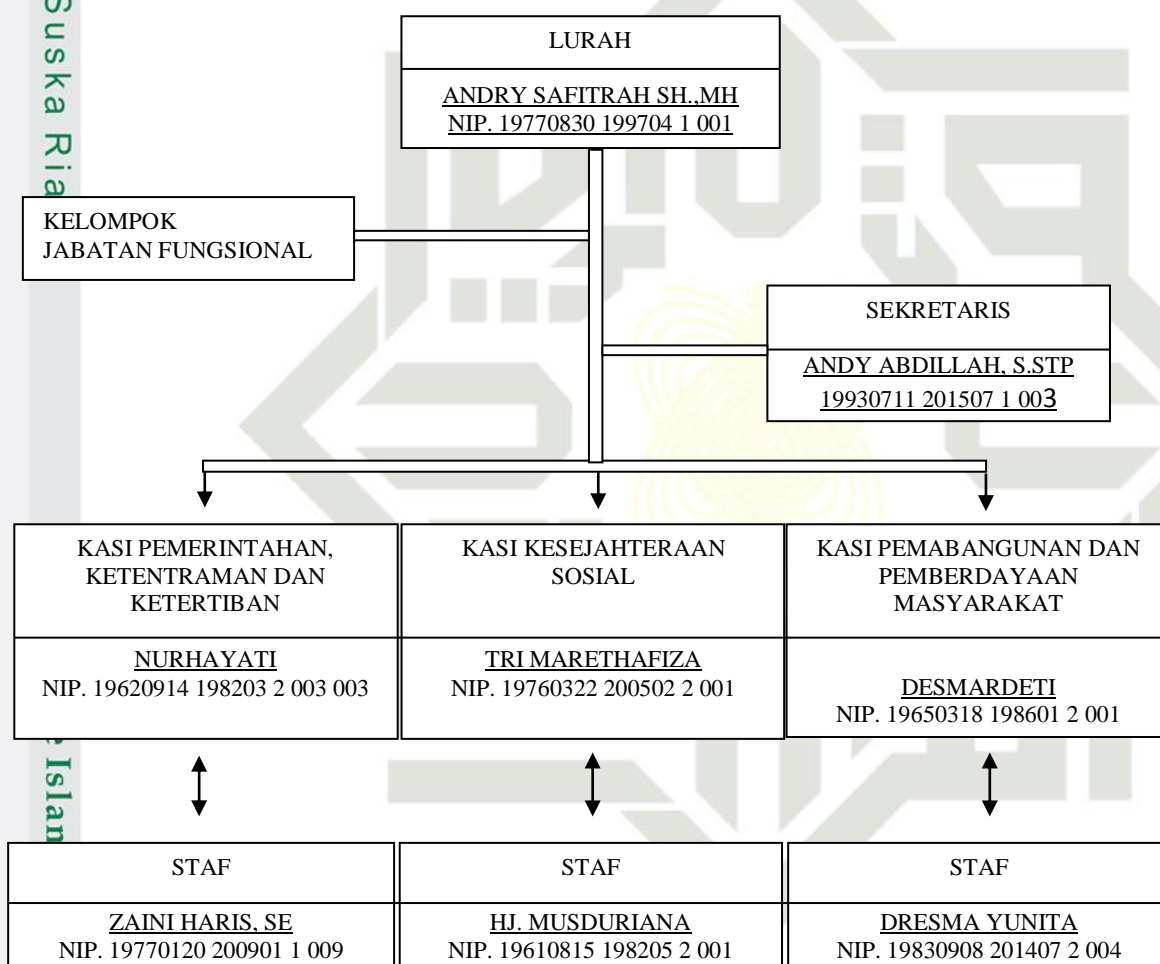
Tabel II.8
Tabel Fasilitas Umum

No	Jenis fasilitas umum	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	7
2	Sekolah Dasar (SD)	6
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	4
4	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MAN)	2
5	Universitas	-
6	Masjid	32
7	Mushalla	18
8	Gereja	-
9	Klinik	9
10	Warnet	12
11	Karaoke	-
12	Biliar	-
13	Hiduran	-
14	Perumahan	15
15	Kuliner	4
16	Dieler	3
17	Sorum	2

²⁸ Ibid.

No	Jenis fasilitas umum	Jumlah
18	Hotel	-
19	Wisma	-
20	Kos-kosan	30
21	Jalan nasional	3

Struktur Organisasi Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sidomulyo Barat²⁹

Tabel II.9
Tabel Keanggotaan PPS

No	Nama	Jabatan
1	Mardalena	Ketua
2	Muhammad Munir	Anggota
3	Zahera	Anggota

Daftar pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Sidomulyo Barat³⁰

Tabel II.10
Tabel Pemetaan TPS

TPS	RW	KETUA KPSS	JUMLAH
1	2	3	6
1	1	ZUFRI	100
2	2	IRFAN ALFIAN	122
3	2	BAYU BUANA	85
4	3	DARMAWAM	119
5	3	APRINALDI	118
6	3	EDYSON	78
7	3	DJAZULI	75
8	3	M. FATHUR R	94
9	4	BATAR G PANE	98
10	4	ADRIAL A. BAKAR	122
11	4	AMRI	58
12	4	TRIE SUCI	72
13	4	YUHALIS	119
14	4	GALIH DWIPRANOTO	96
15	4	ZULFIKAR	102
16	4	DIDIN	105
17	5	SUTARNO	109
18	5	JUNAIDI	103
19	6	ZULFENI	80
20	6	NASRUN.SY	111
21	7	ISKANDAR	67
22	7	ADI PRASTOWO	95
23	7	HARIS SILALAH	104
24	7	SAHMINAL	108

²⁹ Data Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

³⁰ Data PPS Kelurahan Sidomulyo Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TPS	RW	KETUA KPSS	JUMLAH
25	8	GIMIN	89
26	8	NURUDIN	84
27	8	SYAMSUDIN	99
28	9	DARYANTO	85
29	9	ACHMAD PURWANTO	111
30	9	AGUSRAHARJO	90
31	9	MUHAMMAD NUZUL	88
32	10	SUHARNO	126
33	10	SOELAIMAN	132
34	10	HAMDAN	128
35	10	AS'AD SABRAH	109
36	27	SUNU	148
37	11	SERTIWAN	76
38	11	HENDRA SUDRAJAT	114
39	11	FIRDAUS	82
40	12	DEDI KHARANTO	98
41	13	EFENDI	94
42	14	SUPYAYETNO TUSAN	102
43	15	SYARIPUDIN	99
44	15	SELAMAT SUKARSO	126
45	15	BUSTAMI	79
46	16	BUDIANDA	114
47	16	SOFLI BASRI	113
48	17	FAISAL	107
49	17	DEVIZAR GUSTI	92
50	18	IKA RAMDIKA	93
51	19	HERMAN ROZALI	89
52	19	JAMIL SIREGAR	73
53	20	JULIARLIS	127
54	20	ASRIL	80
55	22	RAMA SAFARI	132
56	22	MARTHA ZELFI	74
57	23	EEN SULISMAN	148
58	24	SUTARTO PURWANTO	126
59	25	RIZKI	
60	17	AL HUZAIRI	56
61	1	ADI PURNAMA	79
62	3	DARUSMAN SE	76
63	3	DRS MUHADI YANCE	52
64	3	RUSMIN	85
65	4	YUDI HARIANTO	71
66	4	MUSLIM	50
67	4	SAFRIL	99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TPS	RW	KETUA KPSS	JUMLAH
68	4	DENNY	95
69	6	EDI RIADI	113
70	6	SYAMSI	106
71	8	M.DARDA PRAHRA	93
72	8	DASRIL	42
73	9	ABRAR FIRDAUS	136
74	26	HAIDIR SAPUTRA	110
75	9	NOFI INDRA	100
76	10	AL SAYUTI	95
77	10	WAKIDIN	75
78	11	MERIADI	93
79	12	ADE ERMAYUNITA	95
80	14	YULMEINDRI	99
81	15	EFRIZAL	111
82	15	ARI TANTONO	85
83	15	SAIPUL NASUTION	83
84	16	ANTO Rianto	98
85	16	ANDI JULIASMI	108
86	17	HASAN	50
87	17	ANDRI GROMICO	76
88	19	AMRAN BAHAR	78
89	19	MASYUDI	128
90	20	YONDRA	50
91	22	HERU WIJAYANTO	74
92	23	DEFRIZAL	95
93	24	ARMANDIANSAH	26
94	26	MUCHASAN	100
JUMLAH			8.913

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum

1. Konsep Dasar Pemilihan Umum

Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia dicap tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang ideal menjalankan pemilu (hanya sejumlah kecil yang tidak melaksanakan pemilu seperti Brunei Darussalam dan Negara – Negara timur tengah). Pemilu merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh Negara-negara didunia dengan sistem pemerintahan demokrasi.³¹ Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan.³²

Bagi sejumlah Negara yang mengklaim atau menerapkan diri sebagai Negara demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga Negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga Negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk aspirasi

³¹ Titi Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 329.

³² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 237.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol dari kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyat lah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Suatu negara yang berpenduduk sedikit, dan luas wilayah nya tidak terlalu besar kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan dengan semurni-murnunya apalagi dalam Negara modern diaman jumlah penduduknya sudah banyak, wilayahnya cukup luas maka tidak mungkin meminta pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahan, hal ini dikarenakan masyarakat modern sekarang ini spesialisasi semakin tajam dan tingkatv kecerdasan rakyat tidak sama, hal inilah yang menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dapat dilaksanakan secara murni keadaan menghendaki kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan perwakilan.

Harold J. Laski mengatakan, “ Kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang atau golongan yang ada didalam masyarakat yang dikuasainya.”³³

Sedangkan C. F. Strong dalam bukunya *Modern Politikal Constitution* mengemukakan, “kedaulatan adalah kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya,”³⁴

³³ *Ibid.*, h. 330.

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari segi hukum kedaulatan hakikatnya merupakan kekuasaan yang tertinggi yang harus dilaksanakan oleh Negara. Kekuasaan tersebut meliputi: *Pertama*, kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan serta melaksanakan hukum terhadap semua orang dan golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaan atau kedaulatan kedalam (*internal sovereignty*) ; *Kedua*, kekuasaan tertinggi yang tidak diturunkan dari kekuasaan lain yang dimiliki oleh pihak lain (intervensi Negara lain) dan kedaulatan keluar (*external sovereignty*).

Salah satu ciri Negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu- waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut A.S.S. Tambunan, “ Pemilihan Umum merupakan sarana melaksanakan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk melaksanakan pemerintahan.”³⁵

Adapun menurut M. Rusli Karim, “ Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.”

³⁵ A.S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, dan DPRD*, (Bandung : Binacipta, 2010) h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senada dengan pendapat diatas menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, juga mengatakan :³⁶

Pemilu adalah salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Berbeda dengan pendapat ahli hukum diatas menurut Parulian Donald: “Pemilu memang bukan segala-galanya dalam demokrasi. Pemilu adalah saran pelaksanaan asa demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalm proses dinamika Negara.”³⁷

Kenyataannya, apapun alasannya hanya pemerintahan yang representatiflah yang dianggap memiliki legitimasi dari rakyat untuk memimpin dan mengatur pemerintahan (menjadi pengelola kekuasaan). Sehingga dengan melalui pemilu juga, klaim jajaran elit pemerintah bekerja untuk dan atas nama kepentingan rakyat menjadi dapat diakui.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu Negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut.

³⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Ilmu Hukum UI), h. 329.

³⁷ Parulian Donald, *Mengganggu Pemilu*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006) h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakikatnya pemilu, dinegara manapun memiliki asensi yang sama. Pemilu berarti masyarakat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.

Menurut Parulian Donald,³⁸ ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentuk atau pemupukan kekuasaan yang abash (*otoritas*) dan mencapai tingkat keterwakilan pilitik (*political representativeness*).

Dari sudut pandang tujuan kedua manfaat (tujuan) tersebut merupakan tujuan langsung yang berada dalam skala waktu relatif pendek.

Hal ini mengisyaratkan bahwa manfaatnya dirasakan segera setelah proses pemilu berlangsung. Adapun tujuan tidak langsung dihasilkan dari keseluruhan aktivitas dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik kontestan, maupun para pelaksana dan pengawas dalam kurun waktu yang relative lama, yaitu pembudayaan politik dan pelebagaan politik. Dalam arti yang lebih sedarhana tujuan langsung berkaitan dengan hasil pemilu, sedangkan tujuan tidak langsung berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut.

Dikutip dalam buku Titik Triwulan Tutik,³⁹ Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni: 1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintahan; 2)

³⁸ *Ibid.*, h. 5.

³⁹ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, h. 333.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan perwakilan politik rakyat; 3) sirkulasi elit penguasa; dan 4) pendidikan politik.

Sebagai saran pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka pemilu bertujuan antara lain:

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib;
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
- c. Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.

Memang harus diakui tujuan pemilu secara signifikan berbeda menurut sistem politik yang ada, begitu juga fungsinya. Bagi sistem politik liberal pemilu bertujuan empat sistem pokok. *Pertama*, membentuk basis konsep demokrasi liberal. Tetapi pemilu, tanpa persaingan terbuka diantara kekuasaan sosial dan kelompok politik dalam menuju kekuasaan politik, maka tidak ada demokrasi. *Kedua*, pemilu melegitimasi sistem politik. *Ketiga*, mengabsahkan kepemimpinan politik. *Keempat*, pemilu sebagai unsur pokok partisipasi politik di Negara-negara demokrasi politik.⁴⁰

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan pasal 1 UUD 1945⁴¹ Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Karenanya

⁴⁰ *Ibid.*, h. 334.

⁴¹ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilu adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada warga Negara untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan:

- a. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai;
- b. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercaya oleh para pemilihnya.

Ditinjau dari sudut kelompok warga Negara yang tergabung dalam partai politik, pemilu sangat besar artinya bagi partai politik karena bermanfaat:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para pendukungnya
- b. Jika menang, sebagai media untuk menjalankan programnya.

Dengan demikian, maka pada dasarnya pemilu sangat penting artinya bagi warga Negara, partai politik dan pemerintah. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari pemilu yang jujur, berarti pemerintah itu mendapatkan dukungan yang sebenarnya dari rakyat, tetapi sebaliknya jika pemilu dilaksanakan tidak dengan jujur, maka dukungan rakyat tersebut hanya bersifat semu.

Dari sudut pemilu sendiri, ketiga tujuan pemilu baru dapat tercapai jika pemilu dilaksanakan secara jujur. Sehingga setiap warga Negara yang berhak memilih memberikan pilihan sesuai hati nuraninya.

Menurut Jimly Asshiddiqie tujuan dari pemilihan umum ada 4, yaitu :⁴²

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, h. 418.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk memungkinkan terjadinya terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai,
- b. Untuk memungkinkan terjadinya penggantian jabatan yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

3. Ciri Pemilihan Umum

Dalam sistem pemerintahan demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil merupakan suatu keniscayaan. Banyak ilmuwan politik yang menggunakan pemilihan sebagai parameter demokrasi suatu Negara. Muhammad Asfar,⁴³ memberikan beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi. Pertama, melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. Kedua, melalui pemilu akan tercipta pelembagaan konflik.

Secara konseptual, terdapat dua mekanisme yang dapat melakukan untuk tercipta pemilu yang bebas dan adil, yaitu ;

- a. Menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil (*electoral sytem*);
- b. Menjalani pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi (*electoral process*).

⁴³ Muhammad Asfar, *Pemilihan Umum dan Perilaku memilih 1955-2004*, (Surabaya : Pustaka Eurika), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu Ranney, menyebutkan bahwa ciri- ciri suatu pemilu yang benar-benar bebas, meliputi: (1) diselenggarakan secara leguler; (2) pemilihan yang benar-benar berarti; (3) kebebasan menempatkan calon; (4) kebebasan mengetahui dan mendeteksi pilihan-pilihan; (5) hak pilih orang dewasa yang universal; (6) perlakuan yang sama dalam pemberian suara; (7) pendaftaran pemilih yang bebas; dan (8) penghitungan dan pelaporan hasil yang tepat.⁴⁴

Sistem pemilu hakikatnya merupakan seperangkat metode yang mengatur warga Negara dalam memilih para wakilnya dalam suatu kelembagaan perwakilan rakyat, seperti halnya parlemen. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa sistem pemilihan dapat berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih dalam suatu kursi diparlemen.

Sistem pemilihan sendiri memiliki arti penting terutama berkaitan dengan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi perwakilan. Ada beberapa alasan yang memperkuat argumen tersebut, antara lain:

- a. Sistem pemilihan memiliki konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan;
- b. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh pada jenis kabinet yang akan dibentuk, yaitu apakah kabinet satu partai atau koalisi.
- c. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada bentuk sistem kepartaian, terutama berkaitan dengan jumlah parpol;

⁴⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, h. 335.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh akuntabilitas pada pemerintahan;
- e. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada tingkat kohesi parpol;
- f. Sistem pemilihan berpengaruh pada bentuk dan tingkat partisipasi politik masyarakat
- g. Sistem pemerintahan merupakan elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lain.
- h. Sistem pemilihan dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang demokratis dalam implementasinya.

4. Sistem Pemilihan Umum

Berbagai sistem pemilihan dengan variasi masing- masing menunjukkan indikasi keunggulan dan kelemahan, diantaranya adalah:

a. Sistem Pemilihan Umum Mekanis

Sistem ini menempatkan rakyat sebagai suatu masa individu-individu yang sama. Jadi sistem ini mengutamakan individu sebagai penyandang hak aktif dan memandang rakyat (korps pemilih) sebagai suatu masa individu-individu yang masing- masing mengeluarkan satu suara (suara sendiri) dalam setiap pemilihan. Penganut aliran mekanis merupakan antara lain, liberalis dan sosialis. Adapun bedanya adalah: pada paham liberalis, pemilu mengutamakan sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan-hubungan antar-individu yang bersifat kontraktual; sedangkan pada aliran sosialisme dan khususnya kominisme, pemilu lebih mengutamakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

totalitet kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu dalam *totalitet* kolektif.⁴⁵

Secara substansial sistem pemilihan mekanis memiliki ciri-ciri antara lain:

- 1) Partai-partai yang mengogarnisasikan pemilihan-pemilihan dan memimpin pemilihan berdasarkan sistem *Bi Party* atau *Multy Party* (*liberalisme, sosialisme*) atau *Uny Party* (*komunisme*);
 - 2) Badan Perwakilan Rakyat bersifat badan perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya;
 - 3) Badan Perwakilan yang dihasilkan disebut parlemen;
 - 4) Wakil-wakil yang duduk di badan perwakilan rakyat langsung dipilih.
- b. Sitem Pemilihan Mekanisme Distrik

Sistem pemilihan distrik disebut juga dengan sistem perwalikan distrik atau mayoritas (*single member constituencies*). Dinamakan sistem distrik karena wilayah Negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Misalnya, disuatu ditentukan anggota DPR 300 orang, maka wilayah Negara dibagi dalam 300 distrik (daerah pilihan). Jadi setiap distrik pilihan diwaliki oleh satu orang wakil di DPR.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, h. 337.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 338.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disebut sistem mayoritas, karena untuk menentukan siapa-siapa yang dipilih menjadi wakil rakyat ditentukan oleh siapa yang mendapatkan suara terbanyak (suara mayoritas) dan tidak perlu mayoritas mutlak .

Ditinjau dari segi calon dan keberadaan partai-partai kecil, maka sistem distrik memiliki kebaikan-kebaikan antara lain:

- 1) Setiap calon dari suatu distrik pemilihan biasanya dari distrik tersebut atau bisa dari distrik lain, tetapi orang tersebut dikenal secara baik oleh distrik yang bersangkutan
- 2) Suara yang diberikan kepada calon yang tidak terpilih tidak dapat digabungkan, maka sistem ini mempunyai kecenderungan untuk terjadinya penyederhanaan kepartaian.

Sistem distrik pada dasarnya terdiri dari dua bentuk. *Pertama*, formula pluralitas (pluralitas sederhana). Formula ini dipakai dalam pemilihan wakil tunggal (Presiden, Gubernur, dll). Pada formula ini seorang kandidat atau parpol dinyatakan menang apabila berhasil memilih suara terbanyak dari konstituen. *Kedua*, formula mayoritas. Dalam pola ini kandidat atau parpol berhasil menghasilkan suara pilihan mayoritas (50 + 1) dan mereka berhak mewakili distriknya.

Lijpart sebagai dikutip Muhammad Asfar, mengemukakan dua formula antisipasi suara 50 + 1 dalam formula mayoritas tidak terpenuhi.⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Asfar, *Op. Cit.*, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Formula campuran pluralitas-mayoritas. Dimana mayoritas tidak terpenuhi karena banyaknya kandidat, maka diadakan pemberian suara kedua (formula pluralitas). Caranya penentuan pemenang berdasarkan suara terbanyak yang berhasil dikumpulkan;
- 2) Formula mayoritas pada pemilihan kedua (*majority run off*), yaitu pemilihan yang hanya diikuti oleh kedua kandidat yang memperoleh suara terbesar pada pemilihan putaran pertama, hingga dihasilkan pemenang dengan suara mayoritas.

c. Sistem Pemilu Proporsional

Sistem proporsional adalah sistem dimana presentase dikursi dibadan perwakilan rakyat yang dibagi pada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu. Dengan kata lain sistem ini merupakan metode transfer suara pemilih dikursi parlemen sesuai dengan proporsi suara pemilih. Umpamanya jumlah pemilih yang sah adalah 1000 orang dan jumlah kursi dibadan perwakilan rakyat ditentukan 10 kursi, berarti untuk satu orang wakil rakyat dibutuhkan 100 suara. Pembagian kursi di badan perwakilan tersebut tergantung kepada berapa jumlah yang didapat pada setiap partai politik yang ikut pemilu itu.⁴⁸

Secara umum mekanisme sistem pemilihan umum proposional diterapkan dengan cara kerja sebagai berikut:

- 1) Menentukan alokasi jumlah kursi pada suatu daerah pemilihan
(Provinsi)

⁴⁸ *Ibid.*, h. 339.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menentukan besarnya kuota untuk menentukan berapa suara yang dibutuhkan parpol agar mendapat satu kursi diparlemen.

Besarnya kuota ini bergantung pada jumlah penduduk dan jumlah kursi yang diperebutkan.⁴⁹

Sacara umum penentuan *quto* dalam pengisian lembaga perwakilan rakyat dapat diinformasikan sebagai:

$$Q = X / V$$

Dengan Q = kuota

X = jumlah penduduk suatu wilayah

V = jumlah kursi yang tersedia

Sistem Proporsional dapat digunakan dalam 300 variasi, tetapi ada dua metode yang utama yaitu: (1) *Hare System (Single Tranfarable Vote)*; dan (1) *List System*.

1) *Hare System (Single Tranfarable Vote)*

Dalam sistem ini pemilih diberikan kesempatan untuk memilih pemilih utama, kedua, dan seterusnya dari distrik yang bersangkutan. Jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk memilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 340.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *List System (list proporsional representative)*

Menurut model *List System* (sistem daftar) pemilih diminta memilih diantara daftar- daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilu.

Ditinjau dari segi keberadaan suara dan partai- partai kecil sistem proporsional memiliki kelebihan, antara lain:

- 1) Disenangi partai kecil karena menggabungkan suara memungkinkan partai politik yang kecil mendapatkan kursi dilembaga perwakilan rakyat yang semula tidak mencapai jumlahimbang suara yang ditentukan.
- 2) Tidak ada suara yang hilang, karena karena sering diaktakan bahwa sistem tersebut sangat demokratis, yaitu ada jaminan bahwa satiap suara yang diberiakan akan ada wakilnya dilembaga perwakilan rakyat;
- 3) Karena semua parpol mendapat kursi diperwakilan rakyat yang tidak ditentukan secara daerah, maka sistem tersebut mengakibatkan lembaga perwakilan rakyat bersifat nasional.

Selain kelebihan yang dimiliki sistem proporsional juga memiliki kekurangan-kekurangan, antara lain;

- 1) Penghitungan suara yang berbelit-belit sudah dipastikan akan perlu biaya banyak
- 2) Kurang disenangi oleh parpol yang besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Para pemilih akan memilih parpol bukan perorangan sistem sistem distrik, akibatnya, para pemilih tidak mengetahui siapakan sebenarnya wakilnya di Lembaga Perwakilan Rakyat, kekuasaan sangat besar (karena parpollah siapa yang memilih siapa-siapa calon parpol untuk pemilu itu);
- 4) Ada kecendrungan bertambahnya parpol dan perpecahan akibat ambisi perorangan yang ingin duduk sebagai pemimpin parpol.

Dalam penerapannya, sistem daftar ini terdiri dari dua bentuk. Pertama, sistem daftar tertutup. Pada sistem ini para pemilih harus memilih partai politik peserta pemilu dan tidak bisa memilih calon legislative. Karena dalam sistem ini calon legislative ditentukan dan diurutkan sepihak oleh parpol yang mencalonkannya. *Kedua*, sistem terbuka. Dalam sistem ini pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga memilih calon legislatif, karena parpol tidak menentukan dan mengurutkan secara sepihak calon.

d. Sistem Pemilihan Umum Organisme

Pandangan mekanis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan: geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendikiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Masyarakat dipandang sebagai satu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam *totalite* organisme

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, seperti persekutuan-persekutuan hidup tersebut diatas. Berdasarkan pandangan ini persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih, atau dengan kata lain pengendalian hak untuk mengurus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat.⁵⁰

Pemilihan Organisme secara substansi memiliki ciri-ciri:⁵¹

- 1) Organisme, partai-partai politik itu tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungan sendiri;
- 2) Badan perwakilan merupakan badan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan hidup itu;
- 3) Pemilihan organisme menghasilkan dewan korporatif;
- 4) Wakil-wakil dalam badan perwakilan berdasarkan pengangkatan.

5. Sejarah Pemilihan Umum Indonesia

Sebagai negara yang menganut asas demokrasi, penting bagi warga Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Proses tersebut kita kenal sebagai Pemilu atau Pemilihan umum. Pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu Negara.

Di Indonesia sendiri diketahui bahwa Pemilu presiden diadakan selama 5 tahun sekali, namun sebelum itu prosesnya sempat tidak seteratur sekarang. Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971,

⁵⁰ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, h. 342.

⁵¹ *Ibid.*, h. 343.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir pada 2019.

a. Pemilu 1955⁵²

Pemilu 1955 diadakan dua kali berdasarkan amanat UU No. 7 Tahun 1953. Keduanya dibedakan berdasarkan tujuannya; Pemilu pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 diadakan untuk memilih anggota-anggota DPR. Pemilu kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pada pemilu pertama diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan untuk Pemilu kedua diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan.

b. Pemilu 1971⁵³

Pemilihan Umum kedua ini terjadi pada Masa Orde Baru berdasarkan UU No.15 Tahun 1969. Dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 dengan tujuan pemilihan anggota DPR dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. 10 partai politik ikut dalam pemilu ini; Partai Nadhalatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiiah, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba dan Sekber Golongan Karya.

⁵²Muhadam Labolo, *Op. Cit.*, h. 113.

⁵³*Ibid.*, h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pemilu 1977-1997⁵⁴

Menggunakan sistem yang sama pada sistem yang digunakan pada Pemilu 1971, Pemilu yang terjadi di Masa Orde Baru ini diawali pada tanggal 2 Mei 1977. Berkat terjadinya fusi (peleburan) parpol peserta Pemilu, Pemilu 1977-1997 diikuti hanya 3 peserta :

- 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari partai NU, Parmusi, Perti, dan PSII.
- 2) Partai Golongan Karya (GOLKAR)
- 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba.

d. Pemilu 1999⁵⁵

Mengingat jaraknya yang berdekatan, persiapannyapun tergolong singkat, pelaksanaan pemilu 1999 ini tetap dilakukan sesuai jadwal, yakni 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksi dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 dapat terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Pemilu 1999 menandai pemilihan pertama pada Masa Reformasi. Dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dari Pemilu 1999 inilah demokrasi di Indonesia bangkit. Terbukti melalui jumlah peserta yang ikut dalam pemilihan. Terdapat 48 Partai Politik menjadi peserta pemilu saat itu.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 131.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pemilu 2004⁵⁶

Pada Pemilu 2004, masyarakat dapat secara langsung memilih DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 Anggota DPD serta DPRD periode 2004-2009. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Pemilu 2004 menunjukkan kemajuan dalam demokrasi kita.

f. Pemilu 2009⁵⁷

Pemilu 2009 merupakan pemilihan umum kedua setelah Pemilu 2004 yang diikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diikuti oleh 44 Partai Politik (Parpol), yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh.

g. Pemilu 2014⁵⁸

Diadakan dua kali pada tanggal 9 April 2014 dengan tujuan pemilihan para anggota legislatif, disusul 3 bulan setelahnya pada

⁵⁶ *Ibid.*, h. 151.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 162.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 9 Juli 2014 dengan tujuan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019. Terdapat sepuluh Partai Politik yang mengikuti Pemilu 2014, yaitu : Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

h. Pemilu 2019

Dengan 16 partai politik nasional yang berpartisipasi; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); PDI Perjuangan (PDIP); Partai Golkar; Partai Nasdem; Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda); Partai Beringin Karya (Berkarya); Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Partai Persatuan Indonesia (Perindo); Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Solidaritas Indonesia (PSI); Partai Amanat Nasional (PAN); Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); Partai Demokrat; Partai Bulan Bintang (PBB); dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); ditambah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 partai politik lokal di Aceh yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangroe Aceh, yang menjadi peserta Pemilu 2019. Jumlah ini bertambah dari Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal. Pemilu 2019 akan berlangsung serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden, yaitu pemungutan suaranya digelar dalam satu hari yang sama pada 17 April 2019.

B. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Terdapat 3 (tiga) lembaga yang saling bekerjasama untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Untuk penjelasan masing-masing dari tugas lembaga negara yang menangani pemilu seperti diuraikan di bawah ini:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah nama yang diberikan oleh undang-undang tentang Pemilihan Umum untuk lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. Dalam pasal 22E UUD 1945 sendiri, nama lembaga penyelenggara pemilu itu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum(KPU).⁵⁹ Adanya KPU adalah salah satu dari hasil perubahan UUD 1945, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁶⁰

⁵⁹Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, h. 201.

⁶⁰Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, h. 221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) undang undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas untuk melaksanakan pemilu. Dalam Pasal 8 terdapat tiga jenis KPU, yakni:⁶¹

- a. KPU Merupakan komisi pemilihan umum yang berkedudukan di ibukota sehingga ia merupakan komisi pusat.
- b. KPU Provinsi Sama halnya dengan KPU yang berkedudukan di pusat, bedanya KPU Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- c. KPU Kabupaten/Kota Untuk KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota

Selain itu juga dibentuk beberapa panitia yang berkedudukan sampai di tingkat desa maupun di luar negeri yakni:⁶²

- a. PPK (Panitian Pemilihan Kecamatan) yang bertugas melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan
- b. PPS (Panitian Pemungutan Suara) yang bertugas melaksanakan pemilu di tingkat desa atau kelurahan. PPS ini kemudian membentuk KPPS (Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara) yang bertugas melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang disebut dengan TPS (Tempat Pemungutan Suara).
- c. PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) yang bertugas melaksanakan pemilu di luar negeri. PPLN ini kemudian membentuk KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri) yang mana

⁶¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁶² Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pengutan suara yaitu TPSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri).

Oleh karena KPU berkedudukan baik di daerah maupun pusat maka wilayah kerjanya pun meliputi seluruh wilayah negara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Hal ini dilakukan karena bagaimanapun juga demokrasi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh demi kedaulatan rakyat Indonesia. KPU bersifat mandiri artinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ia bebas dari pengaruh pihak manapun. Hal ini bertujuan agar tidak ada ideologi politik oleh partai tertentu yang memiliki tujuan tersembunyi untuk mendapatkan suara lebih banyak. Di Indonesia, pemilu yang diselenggarakan oleh KPU diantaranya meliputi:⁶³

- a. Pemilu untuk memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
- b. Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
- c. Pemilu untuk Memilih Gubernur, Walikota, dan Bupati

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu akan berbeda antara pemilu untuk memilih pemerintah pusat, daerah, maupun anggota badan perwakilan. Tugas dan wewenang antara KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota pun juga berbeda. Berikut ini adalah tugas dan wewenang KPU secara garis besar diantaranya meliputi:

⁶³ Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Merencanakan program, anggaran, beserta jadwal pelaksanaan pemilu
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja seluruh KPU yang bertugas sampai ditingkat desa
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah
- g. Menetapkan peserta pemilu
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPU Provinsi kemudian membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara
- i. Menerbitkan surat keputusan untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya Dan sebagainya

Demi kelancaran tugas dan wewenang tersebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka dibentuklah sektreariat yang bersifat hirearkis yang meliputi:⁶⁴

- a. Sekretariat Jendral KPU – Sekretariat jendral memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang terkait dengan

⁶⁴ Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan, pemeliharaan arsip dan berbagai dokumen pemilu, serta pengelolaan inventaris pemilu.

- b. Sekretariat KPU Provinsi – Sekretariat ini memiliki tanggung jawab yang sama dengan Sekretariat Jendral KPU, hanya saja wilayah kerjanya adalah Provinsi.
- c. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota – Sekretariat ini bertanggungjawab terhadap wilayah kabupaten/kota yang mana memiliki tanggung jawab yang sama dengan sekretariat yang lainnya.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Didalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 Pasal 1 ayat (17) menyebutkan bahwa Bawaslu adalah “lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Seperti halnya KPU, kedudukan Bawaslu juga meliputi daerah sampai pusat yakni meliputi:⁶⁵

- a. Bawaslu merupakan badan pengawas pemilu di tingkat pusat sehingga berkedudukan di ibukota NKRI.
- b. Bawaslu Provinsi, Merupakan Bawaslu yang mengawasi jalannya pemilu di tingkat provinsi sehingga berkedudukan di ibukota provinsi
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota, Merupakan Bawaslu yang berdasar di tingkat Kabupaten/Kota sehingga kedudukannya di ibukota kabupaten/kota.

Tidak hanya KPU saja yang membentuk kepanitiaan, Bawaslu juga membentuk panitia di berbagai wilayah seperti:⁶⁶

⁶⁵ Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁶⁶ Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota
- b. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang mana bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan
- c. Pengawas Pemilu Lapangan yang merupakan petugas pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk daerah desa atau kelurahan
- d. Pengawas Pemilu Luar Negeri yang mana bertindak untuk mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan di luar negeri.

Sebagai pengawas, Bawaslu memiliki tugas-tugas tertentu dalam penyelenggaraan pemilu seperti yang termuat dalam Pasal 73 ayat (3) meliputi:

- (1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
- (2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a) pelanggaran Pemilu; dan
 - b) sengketa proses Pemilu;
 - c) mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu
- (3) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- (4) Mencegah terjadinya praktik politik uang
- (5) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (6) Mengawasi pelaksanaan putusan-keputusan, seperti putusan DKPP dan Pku
- (7) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
- (8) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
- (9) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (10) Mengevaluasi pengawasan Pemilu
- (11) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bawaslu berwenang untuk melakukan beberapa hal di bawah ini sesuai dengan Pasal 95 meliputi:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dari anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain tugas dan wewenang, Banwaslu juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 96 yakni meliputi:⁶⁷

- (1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- (2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- (3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- (4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (24), DKPP adalah “lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu”.

Tugas DKPP dalam pemilu tertuang dalam Pasal 159 yakni meliputi:⁶⁸

- (1) Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; dan

⁶⁷ Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁶⁸ Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya berwenang :

- a. Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus pelanggaran kode etik.

Selain tugas dan kewenangan DKPP berkewajiban:⁶⁹

- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

⁶⁹ Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Memilih dan Pendaftaran Pemilih

1. Hak Memilih dalam Pemilu

Bagi bangsa Indonesia UUD 1945 telah memberikan jaminan terhadap ha-hak asasi. Keterikatan bangsa Indonesia terhadap masalah-masalah hak asasi, dapat dilihat dari pengaturan hak hak dasar yang dimuat dalam konstitusi. Pengaturan tersebut bukan hanya memuat hak-hak hukum dan politik, tapi juga dibidang sosial ekonomi dan budaya.⁷⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie hak asasi manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya adalah kelompok hak politik, ekomoni, sosial budaya. Dan yang termasuk hak-hak politik adalah Pertama, setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat. Kedua, setiap wagra negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.⁷¹

Menurut Undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, warga Negara Indonesia yang waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum tertera pada pasal 198 yaitu :⁷²

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar maju, 2017), h. 241.

⁷¹ Jilmy Asshiddiqie, *Op. Cit.*, h. 363.

⁷² Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Dari Ketentuan tersebut jelas, bahwa pada hakikatnya setiap warga Negara Indonesia memiliki hak memilih. Warga Negara Indonesia adalah setiap penduduk (orang)yang menurut undang-undang no. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia. Orang –orang yang bukan warga Negara Indonesia adalah orang asing dan mereka tidak memiliki hak pilih di Indonesia.

Meskipun setiap warga Negara Indonesia (laki-laki dan wanita) mempunyai hak untuk memilih, namun UU Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umur adalah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan Umum :

- a. Sudah genap berumur 17 tahun, atau
- b. Belum mencapai usia 17 tahun, akan tetapi sudah kawin terlebih dahulu.

Adapun ketetapan umur 17 tahun adalah berdasarkan perkembangan politik di Indonesia, bahwa warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun ternyata sudah mempunyai pertanggungjawaban politik terhadap Negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan – badan perwakilan rakyat.⁷³

⁷³ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Op. Cit.*, h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, pada pasal-pasal didalam UU Pemilu ada warga Negara Indonesia tidak memiliki hak pilih yaitu :⁷⁴

(1) Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tidak memiliki hak pilih meskipun TNI dan POLRI adalah warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 200 UU pemilu yaitu

“Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.”

(2) Warga Negara yang telah di cabut hak politiknya oleh pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 198 ayat (3) yaitu :

“Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.”

2. Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran pemilih dalam negeri dilakukan oleh KPU pusat maupun KPU daerah yang tercantum dalam Pasal 202- 209 secara umum dengan langkah-langkah meliputi:⁷⁵

(1) KPU kabupaten/kota menggunakan data penduduk dari pemerintah dan di sandingkan dengan data pemilu terakhir untuk memutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih;

(2) Data pemilih potensial setidaknya memiliki Nama, NIK, Tempat Tanggl Lahir, Jenis kelamin, dan alamat

⁷⁴ Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁷⁵ Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) KPU melakukan pemutakhiran 3 bulan setelah menerima data penduduk
- (4) Data penduduk yang sudah dimutakhirkan digunakan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- (5) DPS diumumkan kepada masyarakat oleh PPS untuk mendapatkan masukan dari masyarakat selama 21 hari
- (6) DPS diperbaiki setelah mendapat masukan masyarakat selama 14 hari setelah diberi masukan
- (7) DPS hasil perbaikan diumumkan selama 7 hari
- (8) DPS hasil perbaikan diberikan oleh PPS kepada KPU kab/kota
- (9) KPU kab/kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- (10) DPT di susun dengan basis TPS
- (11) DPT diberikan kepada PPS melalui PPK
- (12) PPS mengumumkan DPT

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS tercantum pada pasal 348 ayat (1) yaitu :⁷⁶

- (1) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
- (2) pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
- (3) pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan

⁷⁶ Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Dengan ketentuan ketentuan yang tercantum didalam pasal ayat (2) dan (3) yaitu ;⁷⁷

Ayat (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.

Ayat (3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.

Kemudian sebagaiman yang ditetapkan pada ayat (4) Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- (1) calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pilihannya;
- (2) calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- (3) Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- (4) calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pilihannya; dan
- (5) calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pilihannya.

⁷⁷ Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari Pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan. Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi terhadap hak memilih dalam pemilihan umum di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Pemilu belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, belum sesuai dengan pasal 202- 209, 210, 344, 348. Banyak kendala-kendala yang di hadapi oleh penyelenggara pemilihan umum baik dari KPU kota Pekanbaru maupun dari PPS hingga di setiap TPS di kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.
2. Adapun faktor penghambat terhadap Implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang no. 7 tahun 2017 di TPS 22 dan 23 kelurahan Sidomulyo barat kec. Tampan adalah :
 - (1) Adanya penambahan waktu terhadap pendaftaran DPTb dan Suket bisa digunakan untuk mencoblos berdasarkan putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 sehingga KPU tidak sanggup untuk mencatat surat suara pada 7 hari sebelum pencoblosan dan tidak bisa memastikan jumlah warga yang menggunakan suket.
 - (2) Kurangnya surat Suara yang didistribusikan oleh KPU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Tidak transparannya KPU dalam Memasukkan surat Suara ke kotak Suara. Dimana KPU tidak melibatkan PPS dan Ketua KPPS dalam memasukkan surat suara ke kotak suara.
- (4) Kurangnya koordinasi antar petugas TPS dilapangan saat hari pencoblasan.
- (5) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran hak pilihnya dan penetapan dan perbaikan sistem DPT yang belum Baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditulis, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk pihak penyelenggara Pemilu yaitu KPU kota Pekanbaru, PPK kecamatan Tampan, PPS di kelurah Sidomulyo Barat serta Petugas TPS di setiap TPS dalam melaksanakan pemilihan Umum hendaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga setiap warga masyarakat dapat terjamin hak pilihnya sebagai warga Negara Republik Indonesia.
2. Untuk masyarakat hendaklah lebih Proaktif dalam setiap kegiatan Pemilu, salah satunya dengan memperhatikan dan memastikan hak pilih dengan cara memeriksa DPS yang telah diumumkan oleh pihak penyelenggara.
3. Bagi pembaca, skripsi ini hanya membahas implementasi terhadap hak pilih. Tentu terlalu kecil lingkup didalam penulisan ini. Hendaknya penulisan ini dapat dikembangkan lagi. Dan semoga skripsi ini bisa dijadikan salah satu referensi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; Erlangga, 2016)
- A.S.S Tambunan, *Pemilu Di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, dan DPRD*, (Bandung : Binacipta, 2010)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2011)
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi manusia*, (Bandung: CV. Mandar maju, 2017)
- C.S.T. Kansil, Christine S.T kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2008)
- HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (UIN Press Surakarta 1999)
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta; Sinar grafika, 2012)
- _____, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012)
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Muhadam Labolo. Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum diIndonesia*, (Jakarta; PT. Raja Grapindo Persada, 2015)
- Muhammad Asfar, *Pemilihan Umun dan Perilaku memilih 1955-2004*, (Surabaya : Pustaka Eurika)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Ilmu Hukum UI)
- Miftah Thoha, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umun di Indonesia*, (Jakarta; PT. Fajar Interpratama mandiri, 2014)
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2006)
- Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT. Alfabeta, 2008)

Titi Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Ubedilah Badrun, *Sistem Politik Indonesia Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2016)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2011)

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Tap MPR RI No. XIV/MPR 1998 tentang Pemilihan Umum

Undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR tahun 1990 s/d 1998 (Jakarta ; Sekretariat Jendral MPR RI, 1999

3. Internet

<http://www.google.com/amp/wartakota.tribunnews.com/2019/04/18/partisipasi-pemilih-pemilu-2019-tembus-8090-persen-jauh-lampaui-target-kpu-775-persen>. Diakses pada 22 Mei 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/25/18185981/kpu-didorong-ajukan-uji-materi-aturan-percetakan-surat-suara>. diakses pada 23 Mei 2019

<http://nasional.kompas.com/read/2019/03/29/10281901/ini-4-putusan-mk-untuk-hari-pencoblosan-pemilu-2019?page=1-2> di akses pada 1 Agustus 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "Implementasi Hak Memilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan)", ditulis oleh saudara :

Nama : SYAHDATUL LATIF
NIM : 11527104153
Program Studi : ILMU HUKUM
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : KAMIS/ 21 MARET 2019
Narasumber : ASRIL, SHI, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

ASFENDI, S.Ag, M.Si
NIP.1961091819880311002

Pekanbaru, 24 Mei 2019

Narasumber

ASRIL, SHI, MH
NIP.197604202009011008

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6215/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SYAHDATUL LATIF

NIM : 11527104153

Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 2 JULI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 1 Agustus 2019
Dekan,


Drs. H. Hajar, M. Ag
NIP. 195807121986031005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5517/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 25 Juni 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYAHDATUL LATIF
NIM : 11527104153
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
2. Kelurahan sidomulyo barat kecamatan Tampan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang no. 7
tahun 2017 tentang Pemilihan umum (studi kasus kelurahan sidomulyo barat kecamatan
Tampan)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/23648
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/5517/2019 Tanggal 25 Juni 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

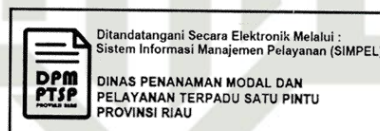
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SYAHDATUL LATIF |
| 2. NIM / KTP | : | 11527104153 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI HAK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
2. KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Juni 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/2086



232018

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/23648 tanggal 26 Juni 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

- Nama : SYAHDATUL LATIF
- NIM : 11527104153
- Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
- Jurusan : ILMU HUKUM
- Jenjang : S1
- Alamat : DESA SEGOMENG KEC. RANGSANG BARAT-KEPULAUAN MERANTI
- Judul Penelitian : IMPLEMENTASI HAK MILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
- Lokasi Penelitian : 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
2. KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Juni 2019

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS
H. MAISISCO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

Di Sampaikan Kepada Yth :

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
- Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TAMPAN
ALAMAT : JALAN H.R SUBRANTAS NO.52 TELP. (0761) 63317
PEKANBARU

Pekanbaru, 27 Juni 2019

Nomor : 45 / KT / VI / 2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET / PENELITIAN

Kepada Yth:
Sdr. Lurah Sidomulyo Barat

Di -
Pekanbaru

Berkenaan dengan Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor: 071/BKBP-REKOM/2019/2086 tanggal 26 Juni 2019 perihal sebagaimana pokok surat di atas, bersama ini Kami minta Saudara kiranya dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian:

Nama : SYAHDATUL LATIF
NIM : 11527104153
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : ILMU HUKUM
Jenjang : S1
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI HAK MILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.


Dra. Hj. LISWARTI
NIP. 19620416 198611 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TAMPAN
KELURAHAN SIDOMULYO BARAT
JL. Purwodadi / Kayu Ramin No. Pekanbaru 28294

Pekanbaru, 28 Juni 2019

Nomor : 40 / SMB / IV / 2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Penelitian

Kepada Yth :
Ketua RW Se-Kelurahan
Sidomulyo Barat
Di,
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Camat Tampan Kota Pekanbaru Nomor :
45/KT/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 Perihal Izin Riset / Penelitian, bersama ini kami
mohon kiranya Bapak dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian :

Nama : SYAHDATUL LATIF
NIM : 11527104153
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : ILMU HUKUM
Jenjang : S1
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI HAK MILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

LURAH SIDOMULYO BARAT

HENDRY SAFITRAH, SH. MH
NIP. 19770830 199704 1 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Jalan Arifin Ahmad No. 39 Telp. (0761) 8415550, 8415551, Fax. (0761) 8415550, 8415551

SURAT KETERANGAN

Nomor: 404 /04-Kt/1471/Sek-Kot/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru:

- Nama : ERWAN TAUFIQ, SE, ME
- NIP : 19650315 199503 1002
- Jabatan : SEKRETARIS KPU KOTA PEKANBARU
- Instansi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

- Nama : SYAHDATUL LATIF
- Fakultas : Syariah Dan Hukum UIN SUSKA Riau
- Jurusan : Ilmu Hukum
- NIM : 11527104153
- Angkatan Tahun : 2015
- Program Studi : S-1

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di KPU Kota Pekanbaru, pada tanggal 27 Juni S/D 19 Juli 2019, dalam rangka melengkapi penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI HAK MILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM".

Demikian keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Juli 2019
SEKRETARIS,


ERWAN TAUFIQ, SE, ME
NIP. 19650315 199503 1002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TAMPAN
KELURAHAN SIDOMULYO BARAT
JL. Purwodadi / Kayu Ramin No. Pekanbaru 28294

Pekanbaru, 25 Juli 2019

Nomor : 61 / SMB / VII / 2019
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada Yth :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Susqa Riau
Di,
Pekanbaru

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Nomor : 40/SMB/IV/2019 tanggal 28 Juni 2019 Perihal Izin Riset Penelitian, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

Nama : SYAHDATUL LATIF
NIM : 11527104153
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN SUSQA RIAU
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI HAK MILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM

Berdasarkan laporan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan saat ini telah selesai melakukan riset/penelitian di Kelurahan Sidomulyo Barat dan pada dasarnya kami menerima dan membantu dalam penyelesaian riset/penelitian tersebut yang dilakukan diwilayah Kelurahan Sidomulyo Barat.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELURAHAN SIDOMULYO BARAT

HENDRY SAFITRAH, SH, MH
NIP. 19770830 199704 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. [0761] 561645 Fax. [0761] 562052
www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : **SYAHDATUL LATIF**
NIM : **11527104153**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Judul : **IMPLEMENTASI HAK MEMILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Studi
Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kec.
Tampar)**

Pembimbing : **Musrifah, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Oktober 2019

An. Pimpinan Redaksi


M. Alpi Syahidin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Daftar pertanyaan wawancara Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Bagaimana Pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 di kota Pekanbaru ?
2. Hambatan / kendala apa yang di hadapi dalam pelaksanaan pemilu ?
3. Bagaimana cara mengatradi kendala kendala tersebut ?
4. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat kota pekabaru pada pemilu tahun 2019 ?
5. Berapa persen partisipasi masyarakat jika dilihat dari DPT ?
6. Bagaimana cara memetapkan DPT ?
7. Apakah ada DPT yan bermasalah ?
8. Bagaimana cara mengatasi DPT yang bermasalah ?
9. Salahsatu permasalahan dilapangan adalah habisnya surat suara , bagaimana hal tersebut bisa terjadi ?
10. Bagaimana alur pendistribuasian surat suara Ke TPS ?
11. Siapa yang bertanggungjawab atas pendistribusian TPS ?
12. Kapan pendistribusian dimulai ?
13. Diamna surat suara disimpan ?
14. Siapa yang mencetak suarat suara ?
15. Hal apa yang bisa dilakukan KPPs jika sura suara Habis ?
16. Kapan waktu TPS tutup dan Buku ?
17. Bagaimana pertanggungjawaban KPU terhadap masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya. ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar pertanyaan wawancara Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Bagaimana Pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 di kel. Sidomulyo Barat ?
2. Hambatan / kendala apa yang di hadapi dalam pelaksanaan pemilu ?
3. Bagaimana cara mengatarasi kendala kendala tersebut ?
4. Berapa Jumlah DPT, DPTb dan BPK di kel. Sidomulyo Barat ?
5. Apakah ada DPT yan bermasalah ?
6. Salah satu permasalahan dilapangan adalah habisnya surat suara , bagaimana hal tersebut bisa terjadi ?
7. Bagaimana cara mengatasinya ?
8. Apakah ada TPS yang Tutup sebelum waktunya ?
9. Apakah ada pemungutan suara ulang ?
10. Bagaimana pertanggungjawaban KPU terhadap masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya. ?

Daftar pertanyaan wawancara KPPS

1. Bagaimana Pelaksanaan pemilu di TPS anda
2. Hambatan / kendala apa yang di hadapi dalam pelaksanaan pemilu ?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?
4. Berapa Jumlah DPT di TPS anda ?
5. Apakah ada DPT yang bermasalah ?
6. Salah satu permasalahan di lapangan adalah habisnya surat suara , bagaimana hal tersebut bisa terjadi ?
7. Bagaimana cara mengatasinya ?
8. Apakah ada TPS yang Tutup sebelum waktunya ?
9. Apakah ada pemungutan suara ulang ?
10. Bagaimana pertanggungjawaban KPU terhadap masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya. ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar pertanyaan wawancara warga

1. Apakah saudara masuk dalam domisili di TPS anda ?
2. Apakah saudara termasuk dalam DPT / DPTb / DPK ?
3. Apakah saudara dapat surat undangan untuk memilih ?
4. Apakah saudara datang Ke TPS pada hari pencoblosan ?
5. Apakah saudara mencoblos di TPS ?
6. Apakah di TPS anda buka dan tutup tepat waktu?
7. Apakah di TPS anda ada Pemunguran suara Ulang ?
8. Apakah ada permasalahan di TPS saudara ?
9. Bagaimana antisipasi KPPS terhadap permasalahan di TPS ?
10. Bagaimana pendapat saudara terhadap pemilihan umum pada tahun 2019 ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, *IMPLEMENTASI HAK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan)*, yang ditulis oleh :

Nama : Syahdatul Latif
NIM : 11527104153
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 12 September 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Oktober 2019

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I
Lovelly Dwina Dahren, SH., MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos., MM

NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Syahdatul Latif, lahir di desa Pelantai kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti Riau pada tanggal 28 Desember 1996 merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Syarifudin dan Ibunda Farida Hanim. Pada tahun 2002 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 015 Segomeng Kecamatan Rangsang Barat Kab. Kep. Meranti Riau. Lulus pada tahun 2008. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang SLTP di MTS Islamiyah Segomeng Kecamatan Rangsang Barat Kepulauan Meranti selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Tamat dari MTS t, penulis melanjutkan pendidikan SLTA di MA Al-Khairiyah Sei. Cina kecamatan Rangsang Berat Kab. Kep. Meranti (sekarang MAN 2 Kepulauan Meranti) selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Kemudian setahun setelah Lulus SLTA pada tahun 2015 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama dua bulan di Kemenkumham Kanwil Provinsi Riau di Pekanbaru. Selain itu penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi baik internal seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (HJM-IH) maupun eksternal seperti mengikuti ajang Duta Lingkungan Kota Pekanbaru pada tahun 2018 sebagai pengasah dan mengolah bakat serta membentuk karakter kepemimpinan yang baik. Atas berkat dan rahmat Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang - orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul *"Implementasi Hak Memilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sedomulyo Barat kecamatan Tampan)"* di bawah bimbingan langsung Ibu Musrifah, SH.,MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 12 September 2019, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). Alhamdulillah, Barokallah.